

Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Program Pembangunan Daerah Wisata Pantai Pascabencana

S. Bkti Istiyanto

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Jl. Kampus No. 1 Grendeng Purwokerto Utara 53132

HP. 085721615515, e-mail : bektiis@yahoo.com

Abstract

Earthquake and tsunami on July, 17 2006 left a lot of notes not only for local community but also for regional government. There were many different policies particularly development communication process for local community from regional government. In Pangandaran Beach, in earlier planning program after disaster, they received grant from government to recovery their live but their involment stopped on action stage although the program is running for five years. The situation happened different in Widarapayung Beach and Parangtritis Beach. There are not integrated recovery programs in Widarapayung Beach from Cilacap goverment until now, only rebuilt several shelter and shops. For Bantul government, they had a program to relocate trade location to a new location and made some rules to stakeholders around Parangtritis Beach. Eventhough the program could not be classified as a recovery program for local community after disaster but the relocation program helped tourism there better than before. This research used qualitative method with indepth interview, observation and documentation to collect data. The informans were collected as represented local government institutions in Ciamis, Cilacap and Bantul goverments and local community there.

Abstrak

Gempa dan tsunami pada 17 Juli 2006, meninggalkan banyak catatan tidak hanya untuk masyarakat lokal tetapi juga untuk pemerintah daerah. Terdapat berbagai kebijakan khususnya pengembangan proses komunikasi untuk masyarakat lokal dari pemerintah daerah. Di Pantai Pangandaran, dalam program perencanaan awal setelah bencana, mereka menerima hibah dari pemerintah untuk pemulihan hidup mereka tetapi keterlibatan tersebut berhenti meskipun program ini berjalan selama lima tahun. Situasi yang berbeda terjadi di PantaiWidarapayung dan Pantai Parangtritis. Tidak terdapat program pemulihan terintegrasi di Pantai Widarapayung dari pemerintah Cilacap sampai sekarang, hanya beberapa penampungan dibangun kembali dan toko-toko. Bagi Pemerintah Bantul, mereka memiliki program untuk relokasi perdagangan ke lokasi baru dan menyusun beberapa aturan bagi *stakeholder* di sekitar Pantai Parangtritis. Walaupun program tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai program pemulihan bagi masyarakat setempat setelah bencana namunprogram relokasi membantu pariwisata yangada lebih baik dari sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Informan yang ada dikumpulkan sebagai representasi lembaga yang diwakili pemerintah daerah di Ciamis, Cilacap dan pemerintah Bantul dan masyarakat lokal di sana.

Kata kunci: komunikasi pemerintah daerah, wisata pantai pascabencana

Pendahuluan

Terjadinya bencana di kawasan pantai yang menjadi kawasan utama pariwisata di Indonesia ternyata masih meninggalkan beberapa catatan penting dalam proses penataan kembalinya. Seperti yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2006, ide utama penataan kembali adalah mengembalikan kawasan yang terkena bencana dapat kembali seperti semula bahkan diharapkan akan menjadi lebih baik. Namun, tahapan pelaksanaan pembangunan kembali di lapangan ternyata masih terkendala dengan situasi dan kondisi yang melingkupi munculnya kebijakan pemerintah daerah atas program pembangunan kembali kawasan wisata pantai yang ada. Tidak semua kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ada menjadikan program pembangunan kembali sebagai prioritas yang mesti dilakukan.

Penelitian Resmiatin dan Istiyanto (2007) di lokasi wisata Pantai Pangandaran Ciamis tentang program pembangunan kembali kawasan pantai berjalan dalam tahapan lima tahun dimulai dari tahapan fisik hingga tahapan mental. Bahkan tahap perencanaan awal, masyarakat dilibatkan dalam penyusunan program pembangunan kembali dari pemerintah. Ada bentuk lembaga yang menjadi payung mekanisme keterlibatan masyarakat Pantai Pangandaran dapat dilihat dari lembaga Rukun Nelayan yang muncul menjadi pintu komunikasi antar nelayan di daerah Pangandaran. Mereka di awalnya mendapat pengganti berupa perahu, jaring dan mesin tempel tergantung kerugian yang diderita berkisar tujuh juta hingga dua puluh lima juta rupiah (Istiyanto, 2010). Sayangnya, lembaga ini sudah tidak aktif karena pertemuan hanya direncanakan setahun sekali. Sebagai pengganti terbentuk kelompok nelayan yang terbagi dalam beberapa kelompok yang membicarakan tentang usaha para nelayan Pangandaran secara umum.

Hal yang terjadi pada masyarakat kawasan Pantai Widarapayung Cilacap justru berbeda dengan pembangunan kembali di Pantai Pangandaran. Masyarakat yang menjadikan obyek wisata Pantai Widarapayung sebagai sumber pencaharian belumlah kembali pada keadaan sebelum terkena bencana. Hal ini diperparah karena belum ada program pembangunan secara sistematis dari

pemerintah daerah Cilacap atas kawasan tersebut. Agak berbeda dengan masyarakat yang mencari nafkah di Pantai Parangtritis Bantul, karena sebelumnya sudah ada larangan membuat bangunan dalam radius 100 meter maka semua bangunan tidak permanen yang hilang atau rusak tidaklah mendapat bantuan pengganti dari pemerintah daerah Bantul. Alasan lain adalah karena memang tidak ada korban jiwa yang muncul akibat bencana tersebut. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah memberikan bantuan sebagai pengganti di awal bencana.

Istiyanto (2010) menyebutkan bahwa bantuan yang telah diberikan pemerintah untuk para korban bencana tsunami di Pantai Pangandaran Ciamis dan Pantai Widarapayung Cilacap di awal pascabencana umumnya sudah mencukupi kebutuhan dasar meskipun masih ada berbagai keluhan. Pemerintah telah mencukupi perlindungan sosial dan ekonomi sebagai upaya nyata pemulihan ekonomi. Bahkan pembangunan bangunan pemecah dan penahan ombak di Pantai Pangandaran telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena dirasakan kemanfaatan secara langsung yaitu timbulnya rasa aman. Ternyata masih terdapat catatan-catatan yang semestinya diperhatikan pemerintah dalam pembangunan kembali kawasan wisata pantai. Karena itulah, menjadi menarik ketika melihat perbedaan komunikasi pembangunan dari pemerintah daerah setempat terhadap masyarakatnya terkait dengan proses pembangunan kembali kawasan pariwisata Pantai Pangandaran Ciamis dibandingkan dengan kawasan pariwisata Pantai Parangtritis Yogyakarta dan Pantai Widarapayung Cilacap.

Dari pemaparan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu: “Bagaimana komunikasi pemerintah daerah Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyikapi program pemulihan daerah wisata pantai pasca bencana?”

Komunikasi Pembangunan

Keberhasilan pembangunan berawal dari adanya komunikasi dalam pembangunan. Komunikasi memiliki peran penting dalam pelak-

sanaan pembangunan. Konsep komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti yang luas dan terbatas. Dalam arti yang luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Sedang dalam arti yang sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan tadi.

Kedua pengertian tersebut di atas merupakan acuan dari konsep komunikasi pembangunan pada umumnya. Sedangkan konsep komunikasi pembangunan khas Indonesia dapat didefinisikan oleh Effendy (2005: 92) sebagai proses penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah, yang dalam keselarasannya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat. Agar komunikasi pembangunan lebih berhasil mencapai sasarannya, serta dapat menghindari kemungkinan efek-efek yang tidak diinginkan maka kesenjangan efek yang ditimbulkan oleh kekeliruan cara-cara komunikasi dapat diperkecil bila memakai strategi komunikasi pembangunan yang dirumuskan sedemikian rupa, yang mencakup prinsip-prinsip berikut; (1) Penggunaan pesan yang dirancang secara khusus (*tailored message*) untuk khalayak yang spesifik; (2) Pendekatan "*ceiling effect*" yaitu dengan mengkomunikasikan pesan-pesan yang bagi golongan yang dituju (katakanlah golongan atas) merupakan redundansi (tidak lagi begitu berguna karena sudah dilampaui mereka atau kecil manfaatnya, namun tetap berfaedah bagi golongan khalayak yang hendak dicapai); (3) Penggunaan pendekatan "*narrow casting*" atau melokalisir penyampaian pesan bagi kepentingan khalayak; (4) Pemanfaatan saluran tradisional, yaitu berbagai

bentuk pertunjukkan rakyat yang sejak lama berfungsi sebagai saluran pesan yang akrab dengan masyarakat setempat; (5) Pengenalan para pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat yang berkekurangan (*disadvantage*), dan meminta bantuan mereka untuk menolong mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan; (6) Mengaktifkan keikutsertaan agen-agen perubahan yang berasal dari kalangan masyarakat sendiri sebagai petugas lembaga pembangunan yang beroperasi di kalangan rekan sejawat mereka sendiri; (7) Diciptakan dan dibina cara-cara atau mekanisme keikutsertaan khalayak (sebagai pelaku pembangunan itu sendiri) dalam proses pembangunan, yaitu sejak tahap perencanaan sampai evaluasinya (Nasution, 2004:163-164).

Rancangan pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam masalah pembangunan kembali wilayah pantai pascabencana terbentuk dengan mengumpulkan masyarakat dan mengklasifikasikannya sesuai bencana yang diterima, kemudian mereka akan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kembali sesuai kemampuan. Perencanaan merupakan salah satu upaya manusia untuk mengatur sebuah kondisi di masa mendatang sesuai dengan keinginannya. Perencanaan dalam hal ini dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk menggali ide dan masukan dari masyarakat yang kemudian ditampung dan dilanjutkan dalam tahapan pelaksanaan.

Pada kasus pembangunan kembali obyek wisata yang terkena bencana di kawasan wisata Pangandaran Ciamis, Istiyanto dan Runtiko (2007) menyimpulkan bahwa pembangunan kembali telah dimulai dari pendataan masyarakat yang secara langsung terkena musibah dan di sanalah komunikasi antar warga tercipta. Warga secara langsung menyampaikan keluhan dan masukan tentang besar kecilnya biaya pengganti dari pemerintah dan hal-hal lain yang perlu dibangun pertama kali seperti bangunan penahan dan pemecah ombak. Sayangnya, proses ini tidak berlanjut ke dalam tahapan berikutnya.

Hedebro (Nasution, 2004:95-96) mengidentifikasi tiga aspek komunikasi dan pembangunan yang berkaitan dengan tingkat analisisnya, yaitu : (1) Pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa, dan bagaimana media massa dapat menyumbang dalam upaya tersebut.

Politik dan fungsi-fungsi media massa dalam pengertian yang umum merupakan objek studi, sekaligus masalah-masalah yang menyangkut struktur organisasional dan pemilikan, serta kontrol terhadap media. Untuk studi jenis ini, sekarang digunakan istilah kebijakan komunikasi dan merupakan pendekatan yang paling luas dan bersifat general (umum); (2) Pendekatan yang juga dimaksudkan untuk memahami peranan media massa dalam pembangunan nasional, namun lebih jauh spesifik. Persoalan utama dalam studi ini adalah bagaimana media dapat dipakai secara efisien, untuk mengajarkan pengetahuan tertentu bagi masyarakat suatu bangsa; (3) Pendekatan yang berorientasi kepada perubahan yang terjadi pada suatu komunitas lokal atau desa. Studi jenis ini mendalami bagaimana aktivitas komunikasi dapat dipakai untuk mempromosikan penerimaan yang luas akan ide-ide dan produk baru.

Dari sekian banyak ulasan para ahli mengenai peran komunikasi pembangunan, Hedebrö (dalam Nasution, 2004:102-103) menyebut salah satu peran utama adalah komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan di tengah kehidupan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kembali Wilayah Pantai Wisata

Partisipasi dapat diartikan sebagai ambil bagian, ikut, atau turut. Istilah ini lebih populer dalam mengartikan ikutnya seseorang atau badan dalam satu pekerjaan atau rencana besar (Marbun, 2002:407). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu proyek pembangunan. Definisi partisipasi dimaknai oleh Sanoff (1990) sebagai suatu interaksi langsung dari individu-individu dalam membahas dan memahami sejumlah hal atau nilai-nilai yang dianggap penting bagi semua. Dua hal penting dalam pendekatan partisipasi yakni individu-individu yang "terlibat" atau "dilibatkan" serta kesepakatan bersama atas substansi" yang dibahas dan dipahami.

Partisipasi berarti perhatian mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang akan dihasilkan untuk suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai

dengan pendapat Nursabagio (1997) yang mengartikan partisipasi sebagai pelibatan diri semua pihak yang berkepentingan (pemerintah, swasta, masyarakat) pada suatu tekad yang menjadi kesepakatan bersama. Jadi, partisipasi adalah suatu kontribusi yang diberikan pihak lain untuk suatu kegiatan, dimana pada masalah ini adalah pembangunan kembali sebuah wilayah pariwisata. Menurut Ite tingkat pelibatan masyarakat dapat diidentifikasi mulai dari manipulasi sampai dengan kontrol oleh masyarakat sendiri (Setiawan, 2000).

Ada beberapa alasan yang mendasari partisipasi masyarakat dalam pembangunan; (1) Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut; (2) Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat; (3) Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan; (4) Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki; (5) Partisipasi memperluas zona (kawasan) penerimaan proyek pembangunan; (6) Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah; (7) Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri (Moeljarto, 1987:48-49).

Pada kasus masyarakat Pangandaran tingkat partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan program pemulihan ekonomi belum terlihat secara optimal sebagai bagian yang langsung terkait dengan kebutuhan mereka (Istiyanto, 2010). Lebih lanjut disebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemulihan ekonomi kawasan wisata ini sudah tidak muncul lagi setelah tahapan perencanaan diselesaikan. Terbukti ditemukan adanya pemasangan papan informasi penanggulangan bencana di Pantai Pangandaran tanpa diketahui dari siapa itu berasal. Masyarakat hanya menerima dari pemerintah tanpa ada pelibatan secara langsung lagi. Artinya, memang ada

strategi partisipatori yang digunakan dalam pelaksanaan komunikasi pembangunan di tahap perencanaan, sayangnya hal tersebut tidak maksimal bahkan pelaksanaan strategi media dan pemasaran sebagai contoh yang dengan bukti pemasangan papan informasi sudah tidak berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat.

Meskipun tingkat partisipasi masyarakat dalam contoh di atas terkait masalah perencanaan dapat dianggap belum optimal, perencanaan dalam pembangunan sebuah wilayah adalah konsep yang utuh dan menyatu dalam pembangunan wilayah itu sendiri. Secara luas, perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan. Perencanaan dan pembangunan wilayah menjadi relevan karena di dalam aspek wilayah dan implementasi dalam kebijakan ekonomi, perencanaan pembangunan wilayah menyimpan tiga pilar penting (Hoover dan Giarratani dalam Nugroho dan Dahuri, 2004:12) sebagai berikut: (1) Keunggulan komparatif (*imperfect mobility of factor*). Pilar ini berhubungan dengan keadaan ditemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakan antar wilayah. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lokal (bersifat khas atau endemik, misalnya iklim dan budaya) yang mengikat mekanisme produksi sumber daya tersebut sehingga wilayah memiliki keunggulan komparatif. Sejauh ini karakteristik tersebut senantiasa berhubungan dengan produksi komoditas dari sumber daya alam; (2) Aglomerasi (*imperfect divisibility*). Pilar ini merupakan fenomena eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya keuntungan-keuntungan (*imperfect mobility*) sebagai akibat pemusatan ekonomi secara spasial; (3) Biaya transport (*imperfect mobility of good and services*). Implikasinya adalah biaya yang terakit dengan jarak dan lokasi tidak dapat diabaikan dalam proses produksi dan pembangunan wilayah.

Dalam proses pembangunan wilayah wisata pantai perlu dilakukan juga pembinaan terhadap masyarakatnya. Pembinaan masyarakat

ini bertujuan untuk memberi perlindungan sosial dan memulihkan sumber daya sehingga masyarakat memiliki pilihan leluasa untuk meningkatkan produktivitasnya. Kegiatannya bersifat meluas meliputi kegiatan-kegiatan pembinaan sumber daya alam, penguasaan teknologi dan informasi, dan peningkatan produksi. Melalui pembinaan intensif masyarakat sekitar pantai ini secara bertahap akan menjadi mandiri, berpendapatan meningkat, dan terbebas dari kemiskinan (Nugroho dan Dahuri, 2004: 290).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari informan yang mewakili keseluruhan sumber data. Seperti yang diungkapkan Bogdan Taylor (dalam Moleong 2001:3), metode kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik dan menyeluruh.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*), pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Pengumpulan data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis, tetapi lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang lebih dikumpulkan dan kemudian dikelompokkan dalam unit-unit. Proses analisis data dimulai dengan mempelajari data yang tersedia dari berbagai sumber atau dokumen yang berkaitan. Analisis dan penyusunan data dibantu dengan teknik kategorisasi, tipologi dan deskripsi. Hasil penelitian berupa bentuk-bentuk komunikasi pembangunan yang dilakukan Pemda dibagi dan dikategorisasikan dalam beberapa tipe dan perbedaannya serta dideskripsikan dalam uraian lengkap yang menjadi hasil pengamatan dan wawancara di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) termasuk Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) yang merupakan lembaga pengelola pariwisata pantai di bawah dinas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis Jawa Barat, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah dan Kabupaten

Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, dan masyarakat kawasan obyek wisata pantai yang terkena dampak langsung bencana gempa dan tsunami 17 Juli 2006. Subjek penelitian sekaligus Informan dipilih dari dinas–dinas terkait tersebut dan juga masyarakat kawasan obyek wisata pantai yang terkena dampak langsung bencana gempa dan tsunami. Informan penelitian diambil sejumlah empat belas (14) orang yang mewakili dinas-dinas terkait dan masyarakat yang mengalami musibah. Objek penelitian difokuskan pada komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh tiga pemerintah daerah terkait dengan pembangunan kembali daerah wisata pasca terkena bencana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perbedaan mendasar penyikapan permasalahan di lokasi penelitian

Terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari hasil penelitian yang diperoleh di tiga lokasi penelitian yang telah ditetapkan yaitu Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis, Pantai Widarapayung Kabupaten Cilacap, dan Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul Yogyakarta antara lain; (1) Korban jiwa di lokasi wisata Pantai Pangandaran sangat besar. Korban meninggal dunia sebanyak 429 orang, korban luka sebanyak 621 orang, korban hilang sebanyak 32 orang dan jumlah pengungsi sebanyak 3.739 orang. Di Pantai Widarapayung tercatat 70 orang meninggal (14 orang warga asli Desa Widarapayung lainnya adalah petani, pengunjug dan warga lain) dan satu orang hilang. Sementara di Pantai Parangtritis tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka. Istilah korban hanyalah berupa bangunan tidak permanen dan berlokasi di batas garis (sempadan) bibir pantai sehingga tidak bisa dijadikan acuan pokok kerugian material yang harus diganti atau diberi santunan oleh pemerintah; (2) Perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membangun kembali kawasan wisata Pantai Pangandaran sangat besar bila dibandingkan dengan yang diberikan pemerintah daerah di kawasan wisata Pantai Parangtritis Bantul, bahkan hampir dapat dikatakan tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah daerah Cilacap untuk kawasan wisata Pantai Widarapayung hingga saat ini; (3) Adanya

program pembangunan kembali (*recovery economy*) secara terpadu di Pantai Pangandaran yang direncanakan sampai tahapan lima tahun oleh pemerintah daerah dan menjadi arahan pembangunan kembali kawasan tersebut. Untuk Pantai Widarapayung, tidak ada program pembangunan yang signifikan yang dirasakan masyarakat, bahkan sekedar program pemasaran wisata yang cukup memadai dari pemerintah daerah pun terasa sangat kurang. Secara struktural memang dibentuk Lakh BPBD (Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah), namun bidang kerjanya tidak hanya menangani kawasan wisata saja tetapi sekedar tindakan preventif dan penanggulangan bencana secara umum dan beraku di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Karena fokus yang ditangani sangat melebar, sementara kebutuhan perbaikan kawasan wisata Pantai Widarapayung sangat ditunggu pelaksanaannya, hal ini memunculkan perhatian dan kepedulian sekelompok masyarakat yang tanggap dengan bahaya munculnya bencana di kawasan wisata Pantai Widarapayung, seperti kelompok SIBAT (Siaga bencana berbasis masyarakat) yang berdiri dan dikomandani oleh tokoh pemuda masyarakat asli Desa Widarapayung. Bahkan dalam aktivitasnya, kelompok ini mendapat bantuan dari pihak GRC Jerman dan UNDP dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) baik berupa bantuan stimulus dana dan bentuk-bentuk lain seperti pelatihan dan penyuluhan. Sementara di kawasan wisata Pantai Parangtritis meskipun pada awalnya tidak merupakan program yang menjadi prioritas dilaksanakan Pemda Bantul, namun adanya bencana gempa yang menimpa daerah Yogyakarta dan Klaten, seolah-olah menjadi pemicu dalam penataan kawasan wisata ini. Terbukti setelah adanya bencana muncul Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan kegiatan usaha atau relokasi di atas batas teraman dari sempadan garis Pantai Parangtritis. Meskipun wacana penataan ini telah muncul di awal tahun 2004, namun dalam praktiknya program ini dijalankan setelah terjadi bencana gempa tahun 2006 tersebut; (4) Bantuan dari berbagai sumber dialokasikan ke dalam beberapa jenis penggantian seperti bantuan atas korban meninggal, luka dan yang menjadi pengungsi serta bantuan modal usaha selain bantuan materi dan nonmateri berupa pelatihan dan penyuluhan bagi pelaku usaha, serta

pembangunan fisik di Pantai Pangandaran Ciamis. Berbeda dengan yang terjadi di Pantai Widarapayung Cilacap dimana hanya ada bantuan bagi korban meninggal namun tidak ada upaya yang sistematis dalam penataan dan pemulihan kembali kawasan wisata pantai. Hal yang berbeda terjadi di kawasan Pantai Parangtritis Bantul dimana tidak terdapat korban jiwa namun justru dijadikan momentum Pemda Bantul dalam bentuk menata ulang lokasi atau relokasi kegiatan usaha masyarakat Parangtritis ke tempat yang lebih aman dan nyaman, setelah sebelumnya berjalan dengan tidak tertib dan bersifat liar serta tidak permanen. Bantuan tidak diberikan berupa uang namun diberikan jatah los atau kios sebagai tempat usaha berdasar pendataan yang resmi dari aparat pemerintahan desa tentang warga dan jumlahnya yang pasti terlibat dalam aktivitas usaha; (5) Terjadi proses komunikasi pembangunan yang berjalan cukup seimbang dalam bentuk keterlibatan masyarakat di kawasan Pantai Pangandaran seperti dilibatkan dalam pendataan, pemberian modal bantuan, pelatihan dan dalam tahap berikutnya tingkat partisipasi bergantung dengan kebutuhannya. Di Pantai Widarapayung, keterlibatan masyarakat tidak berjalan optimal karena memang kurang terjalin adanya komunikasi secara terbuka dan kerja sama antara pemerintah daerah khususnya pengelola wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dengan para pelaku aktivitas kepariwisataan di lapangan salah satu staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kroya yaitu Bapak Ashadi, warga asli Desa Widarapayung. Untuk menjembatani kegagalan komunikasi antara Pemda dengan masyarakat dibentuk suatu pola partisipasi masyarakat dengan membentuk dan mendirikan secara mandiri SIBAT yang tidak terkait secara langsung dengan program-program dari pemerintah daerah namun sangat peduli dengan bencana di daerah mereka. Sementara di kawasan Parangtritis keterlibatan masyarakat adalah dengan pendataan pelaku usaha dari masyarakat sendiri dan mengikuti bentuk-bentuk sosialisasi tentang penjagaan kawasan wisata dari ketidaktertiban baik di lokasi dan upaya menjaga kebersihannya, dan mengikuti penyuluhan tentang kemungkinan bencana-bencana yang mungkin terjadi. Semua ini dilaksanakan berkat adanya

keterpaduan program kerja yang dicanangkan oleh dinas-dinas terkait di Pemda Bantul dan dikomunikasikan kepada masyarakat secara langsung. Dalam evaluasinya, seringkali Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul berfungsi secara praktis di lapangan dengan mendatangi, mengingatkan dan menegur mereka baik dari masyarakat maupun pelaku usaha yang melanggar kesepakatan meskipun dalam kesehariannya seringkali ketika petugas Satpol PP ini meninggalkan lokasi pantai setelah memberi teguran bahkan sedikit memaksa pedagang untuk meninggalkan sempadan pantai, masih ada saja diantara mereka dan anggota masyarakat yang berdagang mendekati sempadan pantai dan mendekati wisatawan. Alasan utama yang sering disampaikan adalah dikarenakan tidak mendapat jatah kios yang diberikan pemerintah daerah di daerah relokasi baru.

Komunikasi Pembangunan Pemda Cilacap Terkait Pembangunan Kembali Pantai Widarapayung Pascabencana

Bencana yang terjadi pada pertengahan tahun 2006 di kawasan Pantai Widarapayung sebenarnya memakan korban yang cukup banyak yaitu 70 jiwa meninggal dan satu orang dinyatakan hilang. Meskipun demikian menurut Ashadi (staf Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kroya dan Ketua SIBAT Widarapayung) sangat berbeda perhatian yang diberikan pemerintah bila dibandingkan dengan apa yang terjadi di Pantai Pangandaran Ciamis. Hampir tidak ada program yang bersifat keseluruhan dan dapat membangun menjadi lebih baik secara terpadu dari pemerintah. Bahkan proses penyampaian komunikasi pembangunan yang paling sederhana seperti kemana arah yang dituju dalam penataan kembali juga tidak pernah disampaikan oleh pemerintah daerah kepada petugas lapangan. Pada akhirnya penataan kembali lokasi wisata hanya menjadi seperti semula seperti sebelum terjadi bencana, bahkan kantor UPTD yang ditempati pun masih bersifat sementara karena berada di lokasi rumah toko yang sedianya akan dijadikan tempat usaha bagi masyarakat.

Secara struktural sebenarnya sudah dibeberikan beberapa tindakan penanggulangan seperti

tindakan tanggap darurat pascabencana dan seperti dikatakan Bapak Suherman (sekretaris Lakhar BPBD Cilacap) atas terjadinya bencana tersebut maka dibentuklah lembaga ini yang nantinya menjadi koordinator dalam persoalan penanggulangan bencana dengan keluarnya Perda 48/2007 dan tahun 2008 secara resmi dibentuklah Lakhar BPBD. Memang diakuinya bahwa saat terjadi tsunami tersebut di daerah kota Cilacap atau khususnya Pantai Teluk Penyu yang juga menjadi objek tujuan wisata utama memang tidak terdapat korban jiwa. Hal itu dikarenakan kota Cilacap terhalang dengan adanya Pulau Nusa Kambangan yang menutup hampir sebagian besar wilayah kota Cilacap dan sumber gempa berasal dari arah Laut Selatan di sebelah barat daya atau berasal dari arah Ciamis Jawa Barat, berbeda bila tsunami yang terjadi dari arah timur (Yogyakarta atau Kebumen) maka dampak tsunami tersebut akan sangat terasa bagi kawasan pinggir pantai. Meskipun demikian pemerintah tidak tinggal diam, ada sebagian kios jualan masyarakat di Teluk Penyu yang dibangun ulang dengan bahan yang lebih kuat meski tidak semua, itu menunjukkan sebenarnya ada perhatian dari pemerintah daerah. Namun karena minimnya proses komunikasi yang terjadi antara pemerintah daerah dengan masyarakat menjadikan proses pembangunan tersebut seperti kurang dirasakan oleh masyarakat.

Kesalahan persepsi atas komunikasi dari pemerintah juga terjadi dalam proses pembangunan fisik seperti yang disampaikan oleh Bapak Aris Cahyanto (Kepala Seksi Pemasaran Disbudpar Cilacap) yang mengatakan dengan adanya tsunami malah membawa perubahan seperti pembangunan fisik di Pantai Widarapayung, yaitu dibangunnya jalan yang sebelumnya rusak menjadi lebih baik karena diaspal. Dalam observasi peneliti memang melihat jalan yang menuju Pantai Widarapayung terlihat lebih baik bila dibanding jalan-jalan di sekitarnya (rute jalan-jalan lain di sekitar Desa Widarapayung). Hanya ketika dikonfirmasi ke Bapak Ashadi dan Agus Riyanto (penggiat SIBAT) bahwa pembangunan jalan ini sebenarnya dikaitkan dengan berita datangnya presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Pantai Widarapayung, bukan dikarenakan pembangunan kembali fasilitas pendukung lokasi wisata. Maka jalan diperbaiki

dalam waktu cukup singkat namun ternyata presiden SBY tidak jadi datang.

Para informan dari penggiat SIBAT menyebutkan bahwa dalam pembangunan wilayah kawasan wisata Widarapayung lebih banyak aktif dan terlibat adalah komunitas SIBAT sendiri yang mewakili masyarakat sekitar dan mengadakan komunikasi dan kerja sama dengan pihak-pihak luar untuk mendapatkan bantuan baik stimulus dana ataupun bentuk-bentuk lain seperti pelatihan dan penyuluhan dari pihak-pihak asing tersebut. Tujuan mengadakan kerja sama ini adalah untuk menciptakan Desa Widarapayung ini menjadi lebih tangguh dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi. Dalam pelatihan-pelatihan yang diberikan juga diberikan hal-hal yang bersifat teknis seperti cara mengevakuasi masyarakat atau korban bila terjadi tsunami. Sebagai stimulus pihak UNDP memberikan dana awal yang akan dijadikan modal awal dan telah digunakan dalam pembuatan mitigasi bencana seperti pembuatan papan penunjuk dan rambu-rambu yang lain di sekitar lokasi wisata demi keamanan wisatawan.

Hal yang masih menjadi keluhan dan beban pemikiran petugas UPTD Kroya terkait dengan pengembangan objek wisata Pantai Widarapayung adalah ketidakjelasan status pelaksanaan tugas kepariwisataan yang akan berakibat pada kelangsungan tugas mereka di masa mendatang. Masalah utama yang disampaikan adalah hak kepemilikan tanah di kawasan wisata Pantai Widarapayung. Menurut Bapak Ashadi, disampaikan bahwa tanah di pinggiran Desa Widarapayung yang menjadi kawasan wisata sekarang ini adalah kepunyaan TNI Angkatan Darat dan bukan berada di bawah kendali Disbudpar atau Pemda Cilacap. Berdasarkan alasan itulah, disebutkannya yang menjadi sebab paling masuk akal bahwa kenapa pemerintah daerah dirasakan tidak mempunyai *grand design* yang jelas tentang objek wisata Widarapayung ini. Padahal dalam waktu-waktu tertentu seperti hari-hari libur kedatangan pelancong ke kawasan ini dalam jumlah yang sangat banyak. Secara ekonomis jumlah pelancong yang datang pastilah memberikan pendapatan yang tidak sedikit. Di lapangan hal tersebut tidak atau kurang terwujud baik dikarenakan alasan pintu masuk yang kurang memadai, kebijakan Pemda yang

tidak fokus seperti apa atau ketidakjelasan pembagian pendapatan antara Pemda, masyarakat dan pihak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNIAD) selaku pemilik lahan.

Pembangunan kembali tempat usaha seperti kios atau los baik makanan atau souvenir dan kolam renang yang sangat dekat jaraknya dengan sempadan pantai. Dalam aturan tertulis batas bangunan terdekat dari bibir pantai (sempadan) adalah berjarak 200 meter dari garis pasang terluar yang biasanya dialami pada saat bulan purnama. Namun dalam kenyataannya, tidak lebih dari 30-40 meter dari bibir pantai sudah terdapat los-los tidak permanen yang berjualan makanan dan souvenir. Sebenarnya hal ini bukan saja membahayakan jiwa baik para pedagang dan wisatawan bila terjadi air pasang tapi juga berpotensi merusak keindahan dan kebersihan di sekitar pinggir pantai. Belum lagi kenyamanan pengunjung akan terganggu karena ruang lepas untuk bermain di pasir atau melepaskan penat melihat ombak sangatlah dekat dan terasa sempit dengan keberadaan para penjual makanan atau souvenir yang berada di lokasi tersebut. Ini menunjukkan ketidakseriusan pemda dalam hal ini Disubpar Kabupaten Cilacap dalam menata sebuah lokasi wisata pantai.

Komunikasi Pembangunan Pemda Bantul Terkait Pantai Parangtritis Bantul Pascabencana

Dalam peristiwa tsunami tahun 2006 secara nyata sebenarnya daerah wisata pantai di selatan Kabupaten Bantul ini tidak mengalami kerugian yang bersifat material. Karena pada saat bencana tsunami menerjang pantai-pantai selatan di Pangandaran dan Cilacap, Pantai Parangtritis hanya mengalami air pasang yang cukup tinggi namun tidak sampai digolongkan sebagai tsunami. Karena itu, tidak ada korban jiwa yang terjadi akibat peristiwa tersebut, hanya berupa rusaknya bangunan-bangunan liar yang tidak permanen yang hilang karena tertelan ombak.

Kerugian yang ditanggung lokasi wisata Pantai Parangtritis dan pantai-pantai lain di sekitarnya (Pantai Samas, Pantai Parang Kusumo, Parang Endok, dan Pantai Depok) tidaklah sampai menelan korban jiwa seperti bencana gempa di

daratan. Namun dengan datangnya bencana gempa ini justru direspon dan menjadi semacam *trigger* (pemicu) untuk menata kawasan wisata pantai di Kabupaten Bantul yang sebelumnya sebenarnya telah diwacanakan sejak tahun 2004 dalam bentuk penataan lokasi wisata pantai dimulai secara bertahap dari Pantai Karang Endok, Pantai Parangtritis, Pantai Parang Kusumo dan Pantai Depok secara menyeluruh.

Ide penataan lokasi wisata pantai (relokasi kegiatan usaha) ini disebabkan oleh beberapa alasan antara lain; (1) Tanah di kawasan wisata ini adalah kepunyaan Sultan Yogyakarta yang diberikan hak pengelolaannya kepada pihak terkait yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Masyarakat hanya mempunyai hak pakai dan dapat digunakan sebagai tempat usaha namun bukan menjadi tempat tinggal; (2) Munculnya banyak keluhan dari para wisatawan kepada pengelola dan pemerintah daerah bahwa kawasan wisata Pantai Parangtritis ini cenderung kumuh dengan parkir yang liar, terlalu banyak pedagang, adanya kotoran binatang dimana-mana dan warung pedagang yang menjorok mendekati bibir pantai yang sangat mengurangi kenyamanan, keamanan dan kebebasan wisatawan dalam mendapatkan hiburan dan ketenangan; (3) Tuntutan atau permintaan merelokasi pedagang ke tempat yang lebih sesuai dengan tata ruang kawasan wisata; (4) Pembagian kios-kios relokasi ini haruslah ditempati warga daerah Kabupaten Bantul asli dengan harapan muncul kebersamaan dalam menjaga suasana yang lebih rapi, bersih, menjanjikan dan tidak liar bila dibandingkan dengan orang di luar Bantul; (5) Munculnya Perda relokasi No. 3/ tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah dalam bentuk pariwisata berbasis masyarakat. Jadi rencana atau wacana relokasi sebenarnya sudah ada jauh sebelum terjadinya bencana gempa tahun 2006, hanya menjadi prioritas untuk disegerakan menjadi program pembangunan yang riil memang setelah terjadi bencana gempa yang melanda Kabupaten Bantul tersebut; (6) Kekuatan utama Kabupaten Bantul ada pada tiga sektor yaitu pertanian, UMKM (industri kecil) dan pariwisata. Sehingga dalam hal kepariwisataan diperlukan penataan kepariwisataan yang lebih memadai dan dapat menyenangkan wisatawan. Karena itu, dibentuk desa-

desa wisata atau desa percontohan seperti di Desa Kebon Agung Imogiri dan desa-desa wisata di sekitar pantai lainnya seperti Desa Parangtritis dan Desa Tirtosari. Meskipun secara khusus keberadaan desa-desa wisata ini bisa dikaitkan dengan bencana gempa yang menimpa Bantul dan sekitarnya. Contoh lain adalah pembangunan 'home stay' yang higienis dan terbebas dari ancaman bencana seperti yang ada di Desa Kebon Agung; (7) Relokasi penataan kegiatan usaha sendiri dinyatakan dalam Peraturan Bupati No 24 tahun 2006 dan dimulai dari akhir tahun tersebut hingga bulan Juni 2007 diupayakan penataan usaha di sepanjang Pantai Parangtritis. Penataan lokasi ini harus dijauhkan dari bibir pantai atau sempadan yang diambil dari jarak 200 meter dari garis pasang laut terluar. Dalam penataan ini sekaligus dibangun jalan dari paving blok untuk wisatawan berjalan kaki sepanjang kurang lebih 2 kilometer yang melewati empat garis pantai di sisinya dari Pantai Parang Kusumo hingga Pantai Depok; (8) Sebelum tahun 2006 ide relokasi ini sudah ada namun karena keterbatasan anggaran dan bangunan yang tidak sesuai menjadikan ide ini sekedar ide hingga terjadi bencana gempa maka dimulailah program pembangunan relokasi kegiatan usaha di kawasan Pantai Parangtritis terlebih dahulu dikarenakan jumlah pengunjungnya yang paling besar diantara empat pantai yang ada. Adapun anggaran diperoleh dari pemerintah bersumber pada anggaran rekonstruksi non perumahan.

Relokasi ini pada akhirnya dianggap menguntungkan kepariwisataan karena sangat memberikan manfaat yang nyata secara khusus kepada masyarakat, antara lain; (1) Adanya kepastian hukum atas kios atau los pedagang yang sesuai kriteria; (2) Lapak-lapak yang diperbaiki telah disesuaikan dengan garis sempadan pantai; (3) Masyarakat asli Bantul mendapat fasilitas berupa tempat usaha yang layak; (4) Dibuatkan pengumuman atau informasi tentang daerah relokasi dimana areal parkir menjadi menyesuaikan dengan lokasi relokasi yang baru (5) Mendapat sosialisasi seperti pengumuman relokasi dan bagaimana bersikap dalam menghadapi bencana yang terjadi; (6) Menjamin keselamatan warga yang berusaha di sana.

Meskipun nilai manfaat yang dapat dipetik sangat besar dirasakan keuntungannya, ternyata

masih ada warga masyarakat yang menolak relokasi ini. Pemerintah daerah telah melakukan pendekatan kepada warga yang menolak dalam bentuk komunikasi yang relatif memadai yaitu dengan menawarkan bangunan permanen, keuntungan yang akan diperoleh, dan diberikan ijin usaha. Hal lain adalah melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dan dalam pembangunannya diberikan bantuan untuk membongkar bangunan mereka. Pada akhirnya mereka yang menolak pun dapat menerima program ini.

Sebenarnya, relokasi yang dibangun di kawasan wisata pantai ini bukan saja sekedar pembangunan kios atau los bagi pedagang namun berupa mitigasi bencana yaitu jalur evakuasi, jalan konblok sebagai sarana transportasi yang menghubungkan Pantai Depok sampai Pantai Karang Kusumo dan pemasangan papan informasi di sekitar kawasan wisata. Relokasi kegiatan usaha di kawasan wisata Pantai Parangtritis pada dasarnya bukanlah murni akibat adanya bencana gempa dan tsunami yang terjadi pertengahan tahun 2006. Karena pada awalnya wacana untuk memindahkan lokasi usaha bagi masyarakat didasarkan pada kondisi di lokasi wisata yang sangat tidak kondusif dalam mendukung kegiatan kepariwisataan. Hanya karena adanya pemicu berupa gempa yang melanda Kabupaten Bantul lah yang menjadikan upaya relokasi kegiatan usaha berubah ke dalam skala prioritas utama yang mendesak untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jikalau tidak terjadi bencana maka program relokasi ini nampaknya bukan merupakan prioritas yang harus dikerjakan apalagi sumber anggaran untuk merelokasi ini pada saat itu belum ada.

Simpulan

Berdasarkan hasil dalam pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; (1) Terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar atas sikap pemerintah daerah khususnya dalam pelibatan masyarakat dalam proses komunikasi pembangunan terkait dengan penyikapan menangani bencana yang melanda kawasan wisata pantai di daerahnya. Komunikasi Pembangunan Pemda Ciamis dalam menangani pemulihan lokasi wisata Pantai Pangandaran Ciamis telah berhasil menyusun program pemulihan ekonomi ma-

syarakat dan melibatkan mereka dalam tahap perencanaan meskipun tidak terlibat lagi dalam tahap pelaksanaan dan evaluasinya, sangat berbeda dengan yang terjadi di lokasi wisata Pantai Widarapayung Cilacap dan Pantai Parangtritis Bantul. Di Pantai Widarapayung sama sekali tidak terdapat program terpadu yang membuat lokasi wisata dan kehidupan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Bahkan karena tiadanya komunikasi yang terjadi antara Pemda setempat atas program pembangunan yang jelas menjadikan kegiatan kepariwisataan di lokasi ini berjalan di tempat. Sementara program yang dilaksanakan Pemda Bantul di Pantai Parangtritis merupakan ide lama yang telah ada sebelum terjadi bencana. Namun kemudian dengan terjadinya bencana gempa pembangunan relokasi kegiatan usaha bagi masyarakat seolah-olah mendapatkan pemicu dan momentum untuk melaksanakannya. Keberhasilan relokasi kegiatan usaha ini didukung adanya komunikasi pembangunan yang memadai dari Pemda kepada masyarakat sekitar lokasi wisata; (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam program komunikasi pembangunan yang terjadi sangat berbeda di tiga lokasi yang diteliti. Kesemuanya sangat tergantung dari inisiatif masing-masing pemerintah daerah dalam melakukan komunikasi pembangunan terhadap masyarakatnya. Bila di Pantai Pangandaran, masyarakat dilibatkan di awal perencanaan program dan program yang disusun dilaksanakan oleh pemerintah. Maka sangat berbeda dengan yang terjadi di lokasi wisata Pantai Widarapayung. Karena tidak ada program pemulihan atau penataan ekonomi masyarakat kawasan pantai dari pemerintah daerah maka pelibatan partisipasi masyarakat menjadi mandiri dan tidak bergantung dengan bantuan pemerintah. Muncul kelompok mandiri masyarakat yaitu SIBAT yang peduli adanya bencana di kawasan wisata tempat mereka tinggal dan hidup serta berjalan tanpa proses komunikasi yang intens dengan pemerintah daerahnya. Sementara untuk masyarakat Pantai Parangtritis sudah dalam tahap menerima karena program ini telah direncanakan Pemda Bantul dua tahun sebelum dilaksanakan dan menjadi pemicu dengan terjadinya bencana gempa yang melanda Kabupaten Bantul dan sekitarnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini yaitu pimpinan dan staf di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis Jawa Barat, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah dan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, serta masyarakat kawasan objek wisata pantai yang terkena dampak langsung bencana gempa dan tsunami 17 Juli 2006.

Daftar Pustaka

- Effendy, Onong Uchyana, 2005, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Istiyanto, Bekti, 2010, *Model Terpadu Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kawasan Objek Wisata Pantai Pascabencana*, Jurnal Ilmiah Pariwisata Terakreditasi Vol. 15, No.2, Juli 2010, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Jakarta.
- Istiyanto, Bekti dan Runtiko, Agus Ganjar, 2007, *Economic Recovery Masyarakat Kawasan Objek Wisata Pangandaran Pasca Gempa dan Tsunami 17 Juli 2006*, Hasil Penelitian.
- Marbun, B.N., 2002, *Kamus Politik*, Muliasari, Jakarta.
- Moleong, Lexi J., 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moeljarto, T., 1987, *Politik Pembangunan*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.
- Nasution, Zulkarimen, 2004, *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nugroho, Iwan dan Rokhim Dahuri, 2004, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta.
- Nursoebagio, E.H., Parwoto, 1997, *Model Partisipasi Intersifikasi Penyuluhan Perumahan*, Makalah pada Lokakarya

- penerapan strategi pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan. Perumahan dan Permukiman, 15 – 16 Juli 1997, BKP4N, Jakarta.
- Resmiatin, Mia, dan Istiyanto, Bekti, 2007, Strategi Komunikasi Pemasaran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Ciamis dalam Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata Pantai Pangandaran, *Jurnal Ilmiah Komunikasi Acta Diurna* Vol 4 No 1. Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Sanoff, Henry, 1990, *Participatory Design: Theory and Technique*, Bookmaster, North Caroline.
- Setiawan, Bakti, 2000, *Kumpulan Kuliah Pembangunan Masyarakat Magister Kota dan Daerah*, UGM, Yogyakarta.
- Suara Merdeka, 13 Mei 2008, *Pantai Widarapayung Tertutup Bagi Wisatawan*, Semarang.
- Sukadana, Made, 2006, *Postmodernisme Dan Pariwisata Kerakyatan*, Jurnal Ilmiah Analisis Pariwisata Volume 7 No 2, Universitas Udayana, Denpasar.